Telukawur Journal of Legal Community Empowerment
Vo. 1, No. 1 (2025), pp. 39-52 doi: xxx
E-ISSN (XXXX-XXXX)

Family Empowerment through Multidisciplinary Education as a Sustainable Development Strategy to Prevent Stunting in Bandarharjo Village

Pemberdayaan Keluarga Melalui Edukasi Multidisipliner sebagai Strategi Pembangunan Berkelanjutan untuk Mencegah *Stunting* di Kelurahan Bandarharjo

Arimbi Khoirinisa[1], Kayla Azizah Rahma[2], Aisyah Jannah Muthmainnah[3], Aditya Ramadhan Indagusta[4], I Gede Gohan Adiputra[5], Putri Ayu Sutrisno[6], Dian Veronika Sakti Kaloeti[7]

[1,3,4,7] Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro, , Jl. Prof. Mr Sunario, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
[5] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
[2,6] Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jl. Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*E-mail: dvs.kaloeti@live.undip.ac.id

Received: 16th September 2025, Revised: 22nd September 2025, Accepted: 30th September 2025, Available online: 1st October 2025, Published: 2nd October 2025

Abstract. Stunting remains a serious problem in Bandarharjo Village, North Semarang District, Semarang City. This condition is caused by limited understanding among families, integrated health post (Posyandu) cadres, and the community regarding parenting patterns, nutrition, and the implementation of government regulations in stunting prevention. To address this problem, a Community Service (PkM) program was implemented based on a multidisciplinary approach involving the fields of psychology, law, government, and nutrition. The program aims to empower families and strengthen the capacity of integrated health post (Posyandu) cadres to support the acceleration of stunting reduction in accordance with government policy targets. The methods used include psychoeducation on parenting patterns and self-control, legal counselling regarding Gubernatorial Regulation No. 34 of 2019 and Mayoral Regulation No. 45 of 2023, socialization of government policies on parenting, and nutrition education related to exclusive breastfeeding and Infant and Young Child Feeding (PMBA). The activities were carried out in a participatory manner through discussions, simulations, and pre- and post-tests to measure improvements in participants' understanding. The results of the activity showed an increase in cadres' and mothers' understanding of regulations, stunting prevention measures, and the importance of balanced parenting and nutrition. *Kader* also began

developing internal guidelines for integrated health service posts (Posyandu) based on regulations, while families demonstrated greater awareness of maintaining child health through nutritional practices and hygienic behavior. Obstacles encountered included the conducive environment of the program's implementation and the limited presence of some cadres, resulting in uneven distribution of knowledge. Overall, this multidisciplinary program contributed to strengthening the role of families, *kader*, and communities as the frontline in stunting prevention. This intervention model can be replicated in other regions as a sustainable effort to support a healthy, stunting-free generation.

Keywords: *Family Empowerment; Multidisciplinary Education; Sustainable Development Strategy; Stunting Prevention; Bandarharjo Village*

Abstrak. *Stunting* masih menjadi permasalahan serius di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman keluarga, kader posyandu, serta masyarakat terkait pola asuh, gizi, dan implementasi regulasi pemerintah dalam pencegahan *stunting*. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis pendekatan multidisipliner yang melibatkan bidang psikologi, hukum, pemerintahan, dan gizi. Tujuan program tersebut adalah memberdayakan keluarga dan memperkuat kapasitas kader posyandu dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan target kebijakan pemerintah. Metode yang digunakan yaitu psikoedukasi tentang pola asuh dan kontrol diri, penyuluhan hukum mengenai Pergub No. 34 Tahun 2019 dan Perwal No. 45 Tahun 2023, sosialisasi kebijakan pemerintah tentang pengasuhan orang tua, serta edukasi gizi terkait ASI eksklusif dan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA). Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif melalui diskusi, simulasi, serta *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman kader dan ibu-ibu mengenai regulasi, langkah pencegahan *stunting*, serta pentingnya pola asuh dan gizi seimbang. Kader juga mulai menyusun panduan internal posyandu berbasis regulasi, sementara keluarga menunjukkan kesadaran lebih baik dalam menjaga kesehatan anak melalui praktik gizi dan perilaku higienis. Hambatan yang ditemui adalah kondusivitas tempat pelaksanaan program dan keterbatasan kehadiran sebagian kader, sehingga penyebaran pengetahuan belum merata. Secara keseluruhan, program multidisipliner ini berkontribusi dalam memperkuat peran keluarga, kader, dan masyarakat sebagai garda terdepan pencegahan *stunting*. Model intervensi ini dapat direplikasi di wilayah lain sebagai upaya berkelanjutan mendukung generasi sehat dan bebas *stunting*.

Keywords: Pemberdayaan Keluarga; Edukasi Multidisipliner; Strategi Pembangunan Berkelanjutan; Pencegahan *Stunting*; Kelurahan Bandarharjo.

Copyright © 2025 by Authors, Published by Telukawur Journal of Legal Community Empowerment. This is an open access article under the CC BY-SA License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

1. Pendahuluan

Stunting masih menjadi isu global yang signifikan dan menjadi tantangan besar dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya target kedua, yaitu mengakhiri segala bentuk malnutrisi. *Stunting* adalah bentuk malnutrisi kronis yang ditandai dengan tinggi badan yang tidak memadai untuk usia anak, seringkali disebabkan oleh kekurangan gizi yang berkepanjangan dan infeksi berulang. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak fisik dan psikologis jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh jangka pendek, *stunting* mempengaruhi laju pertumbuhan, menyebabkan keterlambatan dalam pencapaian tonggak pertumbuhan. Anak yang mengalami *stunting* lebih rentan terhadap infeksi dan memiliki respons imun yang lemah, yang semakin memperburuk risiko terkena penyakit (Yang dkk., 2022). Secara psikologis, *stunting* dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak selama periode pertumbuhan kritis, seringkali menyebabkan keterlambatan perkembangan kognitif dan berkurangnya rentang perhatian. Keterlambatan kognitif ini dapat menghambat prestasi akademik dan keterampilan belajar dasar pada anak-anak usia dini, yang dapat diamati di lingkungan pendidikan awal (Hill dkk., 2010).

Kondisi ini bukan hanya sekadar masalah kesehatan fisik dan psikologis, tetapi juga isu multidimensi yang berkaitan erat dengan kemiskinan, ketahanan pangan, dan kualitas sumber daya manusia (Beal dkk., 2018; Dewey & Begum, 2011). Permasalahan ini menuntut perhatian serius dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, karena *stunting* secara fundamental merusak potensi generasi mendatang dan menghambat kemajuan bangsa.

Di Indonesia, meskipun prevalensinya menunjukkan tren penurunan, angka *stunting* masih cukup tinggi dan menjadi perhatian serius pemerintah. Upaya percepatan penurunan *stunting* telah menjadi prioritas nasional, dengan berbagai program dan kebijakan yang diluncurkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah di tingkat lokal. Kondisi serupa terjadi di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, khususnya di RW XI. Meskipun kegiatan posyandu telah berjalan rutin, angka *stunting* di wilayah tersebut tetap tergolong tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pelaksanaan program yang ada dengan hasil yang diharapkan, sebagaimana penelitian menunjukkan bahwa efektivitas posyandu dalam menekan angka *stunting* sangat dipengaruhi oleh kapasitas kader dalam memahami peran dan kebijakan yang berlaku (Rahmadi dkk., 2023). Kader posyandu, sebagai ujung tombak intervensi di tingkat masyarakat, sering kali terbatas pada kegiatan administratif dan pelayanan dasar, tanpa pemahaman yang memadai terhadap regulasi pemerintah yang seharusnya menjadi panduan strategis bagi mereka.

Oleh karena itu, penanganan *stunting* perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak dan pendekatan multidisipliner yang holistik. Pendekatan konvensional yang hanya berfokus pada pemberian makanan tambahan tidak lagi memadai untuk mengatasi kompleksitas masalah ini. Dari sudut pandang psikologis, *stunting* tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga perkembangan kognitif dan emosional anak. Pola asuh yang kurang memadai, kurangnya stimulasi, dan minimnya

kasih sayang dapat memperburuk dampak *stunting*, sehingga edukasi tentang pola asuh yang benar menjadi sangat penting (Dewey & Begum, 2011). Dari perspektif sosial, *stunting* sering kali berakar pada masalah kemiskinan, minimnya akses terhadap sanitasi, dan kurangnya dukungan sosial. Kader sebagai ujung tombak di lapangan perlu diperkuat kapasitasnya agar bisa menjadi penggerak sosial yang efektif dan mampu menjembatani program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat (Fadillah & Adnan, 2024). Terakhir, dari perspektif gizi, asupan nutrisi yang tidak memadai pada 1000 hari pertama kehidupan menjadi penyebab utama (Beal dkk., 2018). Mengingat kompleksitas ini, diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan aspek hukum (regulasi pemerintah), pola asuh (psikologis), dan gizi, untuk memberdayakan keluarga dan kader. Tujuannya adalah agar mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga agen perubahan yang mampu mengimplementasikan strategi pencegahan *stunting* secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga upaya penurunan *stunting* di tingkat lokal dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan latar belakang di atas, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, serta untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pendekatan multidisipliner dapat secara efektif meningkatkan kapasitas keluarga dan kader dalam upaya pencegahan *stunting*. Adapun tujuan dari kegiatan PkM ini adalah untuk memberikan edukasi dan pemberdayaan untuk meningkatkan pengetahuan kader dan keluarga mengenai regulasi pemerintah terkait percepatan penurunan *stunting*, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman keluarga tentang pentingnya pola asuh yang responsif dan stimulasi yang tepat untuk mendukung perkembangan kognitif dan emosional anak. Serta untuk meningkatkan pemahaman keluarga mengenai gizi seimbang dan praktik pemberian makan yang benar untuk anak usia dini, serta pentingnya sanitasi dan higienitas.

2. Metode

Metode pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang dengan pendekatan partisipatif dan multidisipliner untuk mengatasi kompleksitas masalah *stunting* di Kelurahan Bandarharjo. Metode partisipatif memastikan bahwa intervensi yang dilakukan relevan dengan konteks dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif anggota masyarakat dalam mengidentifikasi dan menangani *stunting* dapat meningkatkan efektivitas intervensi (Onis dkk., 2000). Melibatkan masyarakat juga mendorong rasa kepemilikan dan memastikan bahwa inisiatif disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan spesifik populasi (Beal dkk., 2019).

Program ini tidak hanya berfokus pada aspek gizi, tetapi juga mengintegrasikan dimensi hukum, psikologi, dan kebijakan untuk memberikan intervensi yang komprehensif. Program ini melibatkan 21 partisipan yang terdiri dari 10 kader posyandu dan 11 ibu balita yang berdomisili di kelurahan tersebut. Prosedur pelaksanaannya dibagi menjadi tiga tahapan utama. Tahapan pertama adalah persiapan, di mana tim pelaksana melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui observasi langsung dan wawancara terstruktur dengan para kader serta ibu balita untuk memahami

permasalahan secara holistik. Data yang terkumpul kemudian digunakan untuk menyusun materi edukasi yang relevan. Tahapan kedua adalah pelaksanaan, yang disesuaikan untuk setiap kelompok sasaran. Untuk kader posyandu, kegiatan dilaksanakan dalam satu sesi ceramah tatap muka menggunakan metode diskusi interaktif. Sementara itu, untuk ibu balita, kegiatan dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil (diskusi terfokus) untuk menciptakan suasana yang lebih intim dan partisipatif. Materi yang diberikan mencakup psikoedukasi, penyuluhan hukum, sosialisasi kebijakan pemerintah, dan edukasi gizi (PMBA). Tahapan terakhir adalah evaluasi, yang dilakukan untuk mengukur efektivitas program. Untuk kader posyandu, pengukuran dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test* yang terdiri dari 10 pertanyaan pilihan ganda untuk mengukur peningkatan pengetahuan. Untuk ibu balita, evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam untuk menggali perubahan sikap dan praktik pengasuhan.

3. Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Bandarharjo dilaksanakan dengan melalui beberapa program multidisiplin. Pelaksanaan program multidisiplin terdiri atas sosialisasi kebijakan pemerintah mengenai pola asuh, psikoedukasi tentang *stunting* dari sisi psikologis, penyuluhan terkait Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), serta penyuluhan hukum terkait regulasi pencegahan *stunting* menunjukkan capaian yang positif.

Partisipan pada kegiatan ini berjumlah 21 orang yang terdiri dari 10 orang ibu-ibu dengan anak berusia balita dan 11 orang ibu-ibu kader Posyandu. Materi penyuluhan disusun untuk memberikan pemahaman kepada para kader posyandu. Material utama berupa *leaflet* berjudul “Peran Kader dalam Rangka Integrasi Penurunan *Stunting* di Tingkat Desa/Kelurahan” yang berfungsi sebagai panduan praktis. *Leaflet* tersebut tidak hanya mencakup peran strategis kader, tetapi juga menguraikan kebijakan pemerintah daerah terkait *stunting*, seperti lima pilar strategi dan enam perilaku kunci yang harus dipraktikkan keluarga sesuai Peraturan Walikota Semarang No. 45 Tahun 2023. Selain itu, *leaflet* ini juga memuat delapan aksi konvergensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 34 Tahun 2019, untuk memastikan kader memahami posisi mereka dalam kerangka kerja yang lebih luas.

Kemudian, untuk memperdalam pemahaman kader, materi tersebut dilengkapi dengan *booklet* dan poster yang berfokus pada dua pilar penting pencegahan *stunting*. Pertama, tentang aspek gizi yang disajikan dalam materi "ASI dan MP-ASI: Fondasi Emas Tumbuh Kembang Anak". Materi tersebut memberikan panduan praktis mengenai standar emas pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) mulai dari Inisiasi Menyusu Dini (IMD) hingga tahapan MP-ASI sesuai usia, yang sangat relevan dengan tugas kader di posyandu. Kedua, materi tersebut juga menyoroti aspek pola asuh positif dan kasih sayang, menekankan bahwa kesehatan emosional dan mental anak sama pentingnya dengan asupan gizi. Poster tersebut mengedukasi bahwa interaksi hangat, komunikasi, dan kehadiran orang tua adalah faktor krusial dalam mendukung tumbuh kembang anak secara holistik, mencegah *stunting* dalam aspek fisik maupun psikis.

Keberhasilan penyuluhan ini tidak hanya diukur secara kualitatif melalui testimoni dan observasi lapangan, tetapi juga kuantitatif melalui instrumen *pre* dan *post test*. Instrumen ini terdiri dari soal pilihan ganda yang dirancang untuk mengukur peningkatan pengetahuan kader setelah menerima materi. Pertanyaan dalam tes ini mencakup poin-poin kunci dari *leaflet*, seperti target prevalensi, pilar strategi, peran kader, dan konsep rembuk *stunting*. Harapannya, dengan adanya tes ini, efektivitas kegiatan dapat dinilai secara objektif, dan hasilnya dapat menjadi dasar untuk pengembangan program lanjutan seperti pelatihan atau pendampingan yang lebih intensif bagi kader.

Berdasarkan beberapa program kegiatan multidisiplin yang telah dilaksanakan dalam Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) diperoleh hasil sebagai berikut:

3.1 Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Terkait Parenting

Sebelum mengikuti kegiatan, sebagian besar orang tua dan wali balita belum mengetahui adanya program pemerintah dalam penanganan *stunting*. Setelah diberikan sosialisasi, masyarakat lebih memahami kebijakan pemerintah terkait penanganan *stunting*. Ini ditunjukkan oleh beberapa testimoni peserta:

> "*Saya baru ngeh kalau pemerintah punya program khusus buat balita, jadi sekarang lebih ngerti gimana supaya bisa ikut mengakses layanan itu*" (Peserta A, Ibu dengan anak balita)
>
> *"Ternyata ada program pemerintah ya, untuk balita. Selama ini saya ngira kalau anak kurang gizi itu urusan orang tua aja. Setelah sosialisasi, saya jadi tahu kalau program kayak Posyandu, itu penting banget. Terus ada program gizi dari puskesmas, dan bahkan ada bantuan dari pemerintah daerah. Jadi sekarang saya lebih yakin bisa memanfaatkan layanan itu kalau anak saya butuh"* (Peserta B, Ibu dengan anak balita)

3.2 Psikoedukasi Pencegahan Stunting dari Sisi Psikologis

Materi psikoedukasi mengenai pentingnya kesehatan mental dan pola asuh kolaboratif memberikan dampak nyata pada peningkatan *awareness* masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan testimoni, pemahaman peserta tentang dampak psikososial *stunting* meningkat sebagaimana disebutkan oleh salah satu peserta:

> *"Iya, ternyata anak gak cuma perlu sehat secara fisik, tapi juga perlu dukungan psikologis dari orangtuanya. Dan kita juga jadi lebih paham kalo ternyata pengasuhan itu juga ngaruh untuk mencegah stunting"* (Peserta C, Ibu dengan anak balita)
>
> *"Selama ini saya hanya fokus kasih makan yang cukup untuk anak. Saya gak pernah kepikiran kalau cara saya bicara, kasih perhatian, atau kalau saya sering marah-marah bisa ngaruh ke perkembangan anak juga. Setelah ikut kegiatan ini, saya lebih sadar kalau komunikasi hangat sama anak itu juga sama pentingnya dengan kebutuhan gizi. Ya... saya jadi belajar untuk lebih sabar dan sering mengajak anak ngobrol juga"* (Peserta D, Ibu dengan anak balita)

3.3 Penyuluhan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA)

Pada sesi PMBA, peserta memperoleh pemahaman lebih baik tentang pentingnya ASI eksklusif dan prinsip pemberian MPASI. Sebelum kegiatan, hanya sedikit peserta yang mengetahui standar ASI dan MPASI, sedangkan setelah kegiatan peserta lebih sadar akan pentingnya ASI eksklusif dan bagaimana pemberian MPASI yang tepat untuk anak, sebagaimana disebutkan dalam testimoni peserta:

> *"Sekarang saya ngerti kenapa ASI eksklusif itu penting banget. Tadinya saya mikir yang penting anak kenyang aja, ternyata ASI itu bisa bikin daya tahan tubuh anak lebih kuat sama bantu perkembangan otaknya juga. Terus saya juga baru tau kalau ngasih MPASI terlalu cepet malah bisa bikin pencernaannya belum siap. Jadi habis ini saya mau coba disiplin kasih ASI full 6 bulan, baru MPASI sesuai umurnya"* (Peserta C, Ibu dengan anak balita)
>
> *"Saya pikir bayi boleh dikasih makanan padat supaya cepat kenyang dan cepet gede juga. Tapi ternyata itu bisa berbahaya. Dari penyuluhan ini saya jadi paham kenapa ASI eksklusif sampai 6 bulan itu penting, dan setelahnya MPASI harus tetep bertahap sesuai usia. Sekarang saya lebih percaya diri untuk ngasih makanan yang benar untuk anak saya."* (Peserta A, Ibu dengan anak balita)

3.3 Penyuluhan Hukum Terkait Pencegahan Stunting Berdasarkan Pergub dan Perwal

Kegiatan penyuluhan hukum terbukti mampu meningkatkan pemahaman warga terkait pencegahan *stunting* berdasarkan Pergub 34/2019 dan Perwal 45/2023. Peningkatan ini terlihat dari testimoni dua peserta penyuluhan seperti berikut:

> *"Awalnya saya gak ngerti kalau soal stunting itu juga ada aturannya dari pemerintah. Saya kira cuma urusan dokter atau puskesmas aja. Setelah dijelasin, ternyata ada Pergub 34/2019 sama Perwal 45/2023 yang memang ngatur pencegahan stunting. Jadi sekarang saya paham, aturan itu bukan sekadar tulisan aja, tapi buat ngasih jaminan kalau anak-anak kita dilindungi. Rasanya jadi lebih jelas juga, kalau kita sebagai orangtua harus ikut aturan itu biar anak tumbuh sehat dan pemerintah bisa bantu ngawasin"* (Peserta E, Ibu Kader Posyandu)
>
> *"Dulu saya mikir urusan stunting ya tanggung jawab orangtua masing-masing. Tapi ternyata diatur di Pergub dan Perwal, artinya ini masalah bareng-bareng, ada peran pemerintah dan masyarakat. Jadi kalau saya ikut posyandu, itu bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari aturan yang emang dibuat buat jaga anak-anak kita. Jadi lebih sadar pentingnya ikut kegiatan."* (Peserta F, Ibu Kader Posyandu)

Peningkatan ini juga terlihat dari hasil pengisian *post-test* yang lebih tinggi dibandingkan *pre-test*.

Tabel 1. Perbedaan Skor *Pre-test* dan *Post-test*

	N	Mean	SD	SE	Coefficient of Variation
PRE	3	93.33	11.547	6.667	0.124
POST	3	99.67	0.577	0.333	0.006

Berdasarkan analisis statistik deskriptif, rata-rata nilai *pre-test* sebelum penyuluhan adalah 93,33. Nilai ini menunjukkan tingkat pemahaman awal warga yang sudah cukup baik. Setelah diberikan penyuluhan, rata-rata nilai *post-test* meningkat menjadi 99,67. Ini mengindikasikan adanya peningkatan pemahaman warga terhadap Perda dan Perwal setelah mengikuti penyuluhan.

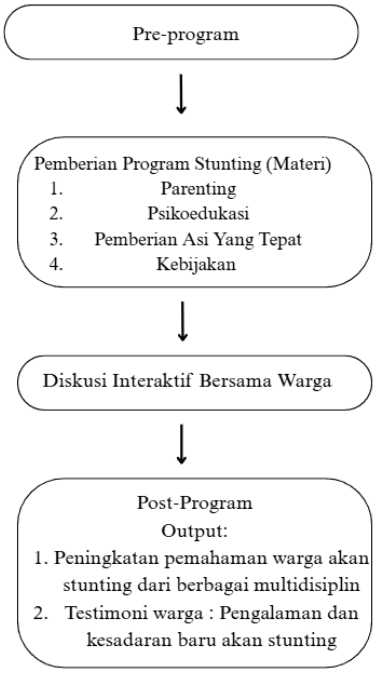

Gambar 1. Alur Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

4. Diskusi

Stunting adalah masalah yang berkaitan erat dengan hak anak untuk mendapatkan gizi yang layak, kesehatan, dan perkembangan optimal, yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai undang-undang. Regulasi pemerintah, seperti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2023, menjadi landasan hukum dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di tingkat daerah.

Peningkatan pemahaman kader terhadap regulasi tersebut sangat krusial. Dengan pemahaman kader yang kuat terhadap kebijakan memungkinkan kader untuk bertransformasi dari sekadar pelaksana menjadi aktor strategis yang mampu mengintegrasikan program pemerintah ke dalam praktik sehari-hari. Ini mencakup kemampuan kader dalam melakukan perencanaan program, terlibat dalam *rembuk stunting*, dan melaksanakan evaluasi kegiatan dengan lebih terarah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah (Rahmadi dkk, 2023).

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan *stunting*, antara lain: pola asuh, dukungan sosial dan tepenuhinya gizi seimbang pada bayi dan anak. Pola asuh memiliki peran vital dalam pencegahan *stunting*. Hal ini ditunjukkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Dewey dan Begum (2011) yang menunjukkan bahwa stimulasi kognitif dan interaksi emosional antara orang tua dan anak sangat mempengaruhi perkembangan otak. Lingkungan yang mendukung secara emosional dan

kognitif memainkan peran krusial dalam mengurangi dampak negatif malnutrisi pada anak. Malnutrisi ditandai dengan kekurangan atau ketidakseimbangan asupan nutrisi, seringkali menyebabkan terjadinya pertumbuhan yang terhambat, gangguan kognitif, dan fungsi imun yang melemah, yang secara signifikan mempengaruhi kesehatan dan perkembangan anak secara keseluruhan (Acosta dkk., 2014). Peran sosial dan komunitas, memiliki pengaruh signifikan terhadap gizi dan hasil kesehatan anak. Lingkungan yang mendukung perkembangan emosional dan kognitif dapat membantu mengurangi beberapa dampak negatif kekurangan gizi dengan menyediakan lingkungan yang stabil dan mendukung di mana anak dapat berkembang dengan baik. Menurut studi (Verma dkk., 2024), dukungan sosial dan emosional dapat membantu meningkatkan ketahanan anak terhadap kondisi yang tidak menguntungkan dan mengurangi stres, yang jika tidak ditangani dapat memperburuk dampak negatif malnutrisi. Selanjutnya, program yang berfokus pada peningkatan gizi dan pendidikan ibu juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung secara emosional bagi ana. Ibu yang terdidik lebih cenderung mengadopsi praktik pemberian makan yang sehat, memastikan pemeriksaan kesehatan tepat waktu, dan menjaga lingkungan yang mendukung pertumbuhan fisik dan mental (Smith & Haddad, 2001). Oleh karena itu, memberikan pendidikan gizi dan akses ke sumber daya kesehatan kepada keluarga secara tidak langsung mendukung perkembangan anak-anak meskipun mengalami malnutrisi. Intervensi psikologis dalam program *stunting*, seperti edukasi mengenai pola asuh yang responsif dan komunikasi efektif, dapat membantu orang tua menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal anak. Aspek ini juga mencakup pentingnya kesehatan mental orang tua, terutama ibu, karena stres dan depresi dapat mempengaruhi kualitas interaksi dan pola asuh (Dewey & Begum, 2011).

Dukungan sosial, baik dari keluarga, komunitas, maupun kader, sangat penting dalam upaya pencegahan *stunting*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadillah dan Adnan (2024) menegaskan bahwa optimalisasi peran kader posyandu membutuhkan dukungan sistematis berupa sosialisasi kebijakan, penyediaan media edukasi yang relevan, dan pelatihan berkelanjutan. Dalam konteks sosial, kader tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai agen perubahan yang menggerakkan partisipasi masyarakat. Pendekatan sosiologis menekankan pentingnya membangun jejaring sosial yang kuat dan memanfaatkan kearifan lokal. Keterlibatan tokoh masyarakat, pembentukan kelompok pendukung ibu, serta kolaborasi antar lembaga di tingkat desa/kelurahan dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perubahan perilaku. Dukungan sosial ini juga berperan dalam mengatasi norma-norma sosial yang salah terkait pola makan atau kesehatan anak, serta mempromosikan praktik-praktik yang lebih baik Penelitian (Fadillah & Adnan, 2024).

Aspek gizi adalah fondasi utama dalam pencegahan *stunting*, yang sangat berfokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu periode kritis dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Penelitian Beal dkk. (2018) menekankan pentingnya intervensi nutrisi yang komprehensif selama periode ini. Intervensi gizi ini mencakup edukasi mengenai pemberian ASI eksklusif, yang berperan penting dalam imunitas dan pertumbuhan awal. Selanjutnya, edukasi mengenai pemberian makanan pendamping ASI

(MPASI) yang tepat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, menjadi krusial untuk memastikan anak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh optimal. Edukasi gizi juga harus mencakup pentingnya diversifikasi makanan, fortifikasi nutrisi, serta praktik sanitasi dan higienitas yang baik. Media konseling, seperti *leaflet*, poster, dan *booklet*, terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat karena akan lebih banyak indera yang terlibat di dalamnya (Syarfaini dkk., 2024).

4.1 Dampak pendekatan multidisipliner terhadap optimasi pemberdayaan keluarga

Pendekatan multidisipliner yang diterapkan dalam program ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, melainkan secara fundamental bertujuan untuk memberdayakan keluarga sebagai agen perubahan utama dalam pencegahan *stunting*. Keberhasilan program dapat dilihat dari pergeseran cara pandang keluarga, dari sekadar penerima informasi menjadi subjek yang memiliki kapasitas, kesadaran, dan kontrol penuh terhadap kesehatan anak mereka.

Sebelum program, pemahaman keluarga tentang *stunting* sering kali terbatas pada isu gizi semata. Melalui program ini, pandangan tersebut diperluas. Edukasi multidisipliner menggabungkan aspek psikologis, gizi, dan pemerintahan untuk membentuk pemahaman holistik. Psikoedukasi tentang pola asuh dan kontrol diri, misalnya, memberdayakan orang tua dengan keterampilan non-gizi yang krusial. Keluarga diajarkan bahwa kesehatan anak tidak hanya ditentukan oleh asupan makanan, tetapi juga oleh lingkungan emosional dan interaksi positif. Studi Adeoya dkk. (2023) menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi bersifat multidisipliner bagi keluarga yang mencakup strategi seperti program berbasis komunitas, dimana hal ini akan mendorong interaksi sosial dan sumber daya komunitas yang dapat mengurangi isolasi serta memberikan stabilitas emosional bagi keluarga.

Selanjutnya, pemberdayaan keluarga terwujud secara nyata dalam perubahan perilaku sehari-hari. Edukasi gizi yang spesifik mengenai ASI eksklusif dan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) memberikan panduan praktis yang dapat langsung diterapkan. Seperti yang tertera pada hasil kegiatan, keluarga menunjukkan kesadaran yang lebih baik dalam menjaga kesehatan anak melalui praktik gizi dan perilaku higienis. Tyarini dkk. (2024) menemukan bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengidentifikasi serta mencegah faktor risiko *stunting* melalui pemberian gizi seimbang, ASI eksklusif akan menekan angka *stunting* dan menciptakan generasi sehat serta produktif.

Selanjutnya, penyuluhan hukum dan sosialisasi kebijakan pemerintah (seperti Pergub No. 34 Tahun 2019 dan Perwal No. 45 Tahun 2023) memberikan dimensi baru dalam pemberdayaan keluarga. Keluarga tidak lagi melihat intervensi *stunting* sebagai program dari luar, tetapi sebagai bagian dari kerangka kebijakan yang melindungi hak-hak anak mereka. Pemahaman ini memberdayakan keluarga untuk menjadi mitra strategis pemerintah dan kader posyandu. Ketika masyarakat, termasuk keluarga, memahami regulasi yang ada, mereka dapat berpartisipasi lebih efektif dalam implementasi program dan menguatkan peran mereka sebagai garda terdepan.

4.2 Keberhasilan melalui Pendekatan Partisipatif dan Berbasis Kebutuhan

Keberhasilan program tidak hanya diukur dari peningkatan pemahaman sesaat, melainkan dari sejauh mana pengetahuan tersebut dapat diinternalisasi dan diimplementasikan secara mandiri oleh peserta. Metode diskusi dan simulasi menstimulasi kader menjadi aktif dalam proses kegiatan. Hal ini menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap program yang dapat dilihat antara lain di inisiatif kader untuk menyusun panduan internal posyandu, yang menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menerima materi, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks nyata. Penelitian Afifa dkk. (2024) menunjukkan bahwa program edukasi yang melibatkan kader secara aktif dalam perumusan solusi (misalnya, membuat media edukasi sederhana atau *role-playing*) menghasilkan retensi pengetahuan dan motivasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan metode ceramah.

4.2 Kendala yang ditemukan

Pelaksanaan kegiatan PkM di lapangan menghadapi beberapa kendala yaitu keterbatasan waktu para kader, dimana para kader merupakan ibu rumah tangga atau ia merupakan seorang pegawai atau pekerja sehingga waktu yang dapat mereka alokasikan untuk mengikuti kegiatan multidisiplin berupa sosialisasi dan penyuluhan menjadi terbatas. Hal ini menyebabkan tidak semua kader dapat hadir secara penuh dalam setiap sesi kegiatan, sehingga penyampaian materi harus dilakukan secara berulang atau melalui metode tambahan seperti penyediaan modul tertulis dan pendampingan individu.

Selain itu, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PkM tersebut yaitu terdapat variasi tingkat pendidikan kader yang memengaruhi kecepatan pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Kader dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih cepat memahami materi penyuluhan dan sosialisasi yang disampaikan, sementara kader dengan pendidikan lebih rendah membutuhkan penjelasan yang lebih sederhana, contoh praktis, dan pendampingan intensif. Perbedaan ini mengharuskan tim pengabdian menyesuaikan metode penyampaian materi agar tetap inklusif dan dapat diterima oleh seluruh peserta.

Disamping itu, minimnya pemahaman kader dan masyarakat terhadap regulasi yang mengatur terkait pencegahan *stunting* menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program PkM sebagai salah satu upaya pencegahan *stunting*. Banyak kader belum sepenuhnya memahami kebijakan pemerintah terkait pencegahan *stunting*. Hal ini menyebabkan implementasi program di tingkat desa kurang optimal karena kader belum mengetahui secara menyeluruh peran, tanggung jawab, serta indikator yang harus dicapai.

Kombinasi keterbatasan waktu, perbedaan tingkat pendidikan dan minimnya pemahaman kader terhadap regulasi ini menjadi kendala yang harus dihadapi dalam penerapan program multidisiplin untuk pencegahan *stunting*. Tim pengabdian perlu melakukan strategi tambahan seperti penyusunan jadwal yang fleksibel, penyediaan materi berupa modul, leaflet, *flyer,* dan poster serta pendampingan berulang agar kegiatan dapat berjalan efektif dan mencapai sasaran yang diharapkan.

4.4 Keunggulan: modul regulasi sederhana, mudah dipahami, dan langsung aplikatif.

Tabel 3. Solusi pengabdian masyarakat

Masalah	Solusi	Luaran
Kader posyandu kurang memahami regulasi *stunting*	Edukasi regulasi berbasis modul dan pelatihan partisipatif	Peningkatan pemahaman regulasi
Tidak ada panduan standar implementasi	Penyusunan SOP *(Standard Operating Procedure)* bersama kader	SOP posyandu berbasis regulasi

Tabel 4. Perubahan hasil kegiatan

Kondisi Awal	Intervensi	Perubahan kondisi
Rendahnya pengetahuan regulasi kader	Edukasi dan FGD regulasi *stunting*	Peningkatan pemahaman dan peningkatan keterampilan praktis kader

5. Kesimpulan

Kegiatan yang dilakukan melalui edukasi multidisipliner berhasil memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas keluarga sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penurunan stunting di Kelurahan Bandarharjo. Penguatan kapasitas kader posyandu sebagai bagian dari keluarga melalui edukasi regulasi terbukti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Bandarharjo. Kontribusi nyata berupa peningkatan pemahaman, SOP posyandu, dan penguatan peran kader sebagai agen perubahan di masyarakat. Pendekatan multidisipliner yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan hal positif dimana kolaborasi lintas bidang menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai *stunting*, sekaligus memperkuat keluarga dalam melakukan upaya preventif *stunting* semenjak dini.

Melalui kegiatan ini, keluarga di Kelurahan Bandarharjo berdaya dalam mengasuh, memenuhi kebutuhan gizi, serta membangun lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang optimal anak. Keterbatasan kegiatan ini terdapat pada waktu yang dimiliki oleh peserta untuk mengikuti kegiatan dan variasi kemampuan peserta. Ke depannya, kegiatan pengabdian masyarakat dapat berfokus pada pendampingan lanjutan bagi keluarga berisiko tinggi, penguatan kapasitas kader posyandu, dan kolaborasi berkelanjutan untuk mencapai target SDGs dalam hal ini khususnya terkait kesehatan dan kesejahteraan anak.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibiayai oleh Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Selain APBN) Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025 dengan nomor 274-141/UN7.D2/PM/IV/2025.

Referensi

Acosta S. R.; Trigoso, D. R.; Zaidi, A. K. M.; Wang, V.; Nesamvuni, C.; Chen, P.; Mapula, A.; Tor, S.; Olotegui, M. P.; Lee, G.; Dinesh, M.; Olmsted, L.; Shakoor, S.; Tountas, K.; Houpt, E.; Patil, C.; Chávez, C.; Nayyar, G.; Shrestha, S., A. . P. (2014). The MAL-ED study: a multinational and multidisciplinary approach to understand the relationship between enteric pathogens, malnutrition, gut physiology, physical growth, cognitive development, and immune responses in infants and children up to 2 years of age in resource-poor environments. *Clinical Infectious Diseases*, *59*(Suppl 4), S193–S206. https://doi.org/10.1093/cid/ciu653

Adeoya, A. A., Egawa, S., Adeoya, A. S., & Nagatomi, R. (2023). Improving child nutrition in disasters by developing a modeled disaster preparedness nutrition education curriculum. *Frontiers in Public Health*, *11*(December). https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1293875

Afifa, I., Novianti, A., Pangiuk, A., & Hafiz, A. P. (2024). Studi Kualitatif Keterlibatan Kader Posyandu Dalam Program Pencegahan Stunting. *Vitamin: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum*, *2*(1), 71–80.

Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D., & Neufeld, L. M. (2018). A review of child stunting determinants in Indonesia. *Maternal & Child Nutrition*, *14*(4). https://doi.org/10.1111/mcn.12617

Dewey, K. G., & Begum, K. (2011). Long-term consequences of stunting in early life. *Maternal & Child Nutrition*, *7*(3), 5–18. https://doi.org/10.1111/j.1740-8709.2011.00349.x

Fadillah, M. I., & Adnan, I. Z. (2024). Optimalisasi peran kader posyandu dalam upaya pencegahan stunting di Desa Pamekarsari. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, *6*(1), 72–82. https://doi.org/10.24036/abdi.v6i1.556

Onis, M. de, Frongillo, E. A., & Blossner, M. (2000). Is malnutrition declining? An analysis of changes in levels of child malnutrition since 1980. *Bulletin of the World Health Organization*, *78*(10), 1222–1233.

Pemerintah Kota Semarang. (2023). Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang. JDIH Kota Semarang. https://peraturan.bpk.go.id/Details/263158/perwali-kota-semarang-no-45-tahun-2023

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2019). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomoahmr 34 rTahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting*. JDIH Provinsi Jawa Tengah. https://jdih.jatengprov.go.id/downloads/produk_hukum/pergub/pergub_tahun_2019/pergub_34_th_2019.pdf

Rahmadi, A., Rusyantia, A., & Wahyuni, E. S. (2023). Peningkatan kapasitas kader posyandu tentang antropometri, pemantauan pertumbuhan dan makanan balita melalui pelatihan dan pendampingan dalam rangka pencegahan stunting di Desa Sukamenanti, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, *3*(6), 1811–1818. https://doi.org/10.54082/jamsi.1027

Smith, L. C., & Haddad, L. (2001). How important is improving food availability for reducing child malnutrition in developing countries? *Agricultural Economics*, *26*(3), 191–204. https://doi.org/10.1016/S0169-5150(01)00056-1

Syarfaini, S., Tahar, T. N. L., Hadza, R. Q., Sumarlin, R., Nurfadillah, A., Irvan, M., Husain, Z., & Kanang, B. (2024). Efektivitas Media Edukasi Gizi Terhadap Upaya Pencegahan Stunting: Literature Review. *Al GIZZAI: Public Health Nutrition Journal*, *4*(1), 59–79. https://doi.org/10.24252/algizzai.v4i1.44183

Tyarini, I. A., Setiawati, A., Rahagia, R., & Maidelwita, Y. (2024). Community empowerment in stunting prevention and control to build a healthy and productive generation. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Edukasi Indonesia*, *1*(3), 100–106.

Verma, H., Verma, A., Bettag, J., Kolli, S., Kurashima, K., Manithody, C., & Jain, A. (2024). Role of Effective Policy and Screening in Managing Pediatric Nutritional Insecurity as the Most Important Social Determinant of Health Influencing Health Outcomes. *Nutrients*, *16*(1). https://doi.org/10.3390/nu16010005

Yang, W., Liang, X., & Sit, C. H. P. (2022). Physical activity and mental health in children and adolescents with intellectual disabilities: a meta-analysis using the RE-AIM framework. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, *19*(1), 1–15. https://doi.org/10.1186/s12966-022-01312-1